

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran



Penerbit
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran

Terakreditasi "C" berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas
Nomor: 26/DIKTI/KEP/2005, tanggal 30 Mei 2005

SUSUNAN DEWAN PENYUNTING

Penanggung Jawab

Bujang Rahman

Ketua Penyunting

Patuan Raja

Dewan Penyunting

*Ag.B. Setiadi, N.E. Rusminto, Sumadi, Herpratiwi
Edi Suyanto, Caswita, Agus Suyatna, Basrowi.*

Penyunting Teknik

C.E-kanto, M.Widodo, Amrullah

Tata Usaha

Anwar, Zainuddin

Alamat

Sekretariat Dekan Gedung A FKIP Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Tlp: (0721) 704624, Fax: (0721) 709493, email: jppfkip@unila.ac.id

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran terbit pertama kali April 2003,
jurnal diterbitkan dua kali setahun, pada bulan Maret dan September,
Dewan Penyunting menerima naskah hasil penelitian bidang pendidikan
dan pembelajaran yang telah diringkas, untuk dipertimbangkan pemuatannya.

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran

PENGANTAR

Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran volume 6 nomor 2, Juni 2008 dapat diterbitkan.

Perlu disampaikan bahwa Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Kala terbitan 2 kali dalam setahun mulai tahun 2005, yaitu pada bulan Maret dan bulan September.

Naskah yang dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam jurnal adalah artikel hasil penelitian dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Naskah yang akan diterbitkan disampaikan kepada dewan penyunting paling lambat dua bulan sebelum waktu penerbitan.

Dewan penyunting sangat mengharapkan keterlibatan dari berbagai pihak agar jurnal ini dapat diterbitkan dengan teratur. Dewan Penyunting mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis naskah yang telah menyumbangkan artikel pada nomor ini.

Bandar Lampung, Juni 2008

Dewan Penyunting

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran

DAFTAR ISI

	Halaman
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PARA GURU SAINS DALAM MELAKSANAKAN ASESMEN RINERJADI SMP <i>Ana Ratna Wulan</i>	101 - 108
MENINGKATKAN KEMAMPUAN METAKOGNITIF SISWA SMP MELALUI PEMBELAJARAN <i>OUTDOOR</i> DAN <i>FUN GAME ACTIVITIES</i> BERBASIS LINGKUNGAN <i>Tumisem</i>	109 - 116
PENGARUH KOMPETENSI KOMUNIKASI DAN KEBIASAAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR DALAM MATA KULIAH SIM PENDIDIKAN MAHASISWA PASCASARJANA KONSENTRASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN <i>Abdorrahman Gintings</i>	117 - 130
STUDI DESKRIPTIF ANALITIK TENTANG TINGKAT "CONCERN" GURU IPS TERHADAP INOVASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMP KOTA BENGKULU <i>Wachidi</i>	131 - 136
PENINGKATAN IMPLEMENTASI PENANGANAN MAHASISWA AKTIF LEWAT MASA STUDI (ALMS) PADA PROGRAM D II PGSD FKIP UNIVERSITAS TERBUKA. <i>Asnah Said dan Prayekti</i>	137 - 146
ANALISIS SIKAP MAHASISWA D2 UNILA ANGKATAN AKADEMIK 2005/2006 TERHADAP JABATAN GURU SEKOLAH DASAR <i>Suyanto</i>	147 - 152
SISTEM SAPAAN GELAR ADEK ADAT LAMPUNG DIALEK "O" PEPADUN <i>Mulyanto Widodo</i>	153 - 158
PENGARUH MOTIVASI DAN AKTIVITAS DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X SMA AL-KAUTSAR BANDAR LAMPUNG <i>Neni Hasnunidah</i>	159 - 164
PENGGUNAAN MEDIA ANIMASI DAN LEMBAR KERJA MAHASISWA UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATERI KULIAH STATISTIKA SOSIAL <i>Yarmaidi dan I Gede Sugiyanta</i>	165 - 174
KEMAMPUAN GURU DALAM MERANCANG PROGRAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KOTA BANDAR LAMPUNG <i>Een Y. Haenilah</i>	175 - 180
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN DENGAN <i>MUSIK NYUBUK</i> DI TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP <i>Sasmiali</i>	181 - 190

DAFTAR ISI	Halaman
PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR FISIKA SISWA DENGAN PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERTIF TIPE TEAM GAMES TOURNAMENT <i>I Dewa Putu Nyeneng</i>	191 - 196.
POLA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN APRESIASI PROSA FIKSI BERDASARKAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF DI SEKOLAH DASAR KOTA METRO LAMPUNG <i>Suwarjo</i>	197 - 202
THE USE OF SCHEMATA IN READING COMPREHENSION (A Case of Reading Problems) <i>Cucu Sutarsyah</i>	203 - 216
PENGUASAAN <i>THE HIGH-FREQUENCY WORDS, ACADEMIC VOCABULARY</i> DAN SKOR TOEFL MAHASISWA TAHUN PERTAMA PS PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG <i>Ari Nurweni</i>	217 - 224
PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR PROVINSI LAMPUNG <i>Herpratiwi</i>	225 - 236
KAJIAN PEMBELAJARAN BIOLOGI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS: KESULITAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN <i>Adi Rahmat, Sri Redjeki, dan Riandi</i>	237 - 247

PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR PROVINSI LAMPUNG

INCLUSION EDUCATION PROGRAM AT ELEMENTARY SCHOOLS IN LAMPUNG PROVINCE

Oleh

Herpratiwi

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unila

Abstract: *The Indonesian government has issued the policy of inclusion education program in the light of implementing justice principle in education, providing children with easy access to education, and encouraging success in compulsory education. There are 17 elementary schools assumed to run the inclusion education program in 8 regencies/cities of Lampung Province. This research is to have a look at how the schools run the inclusion program. The research problem is formulated as the following: "How do the school members perceive the inclusion education program run at the elementary schools in Lampung Province?" The research is intended to describe the perceptions of the school members towards the inclusion education program carried out by the elementary schools of Lampung Province, comprising the teachers, curriculum, learning plan, facilities, financing, learning strategies, evaluation, learning achievement, and outcomes. The research was conducted at the 17 elementary schools throughout Lampung Province, using quantitative descriptive method. The research population was made up of the principals, school committees, teachers, "normal" students' parents, parents of students "with special needs", and "normal" students". The sampling technique used in this research was random sampling, i.e. 25% of the number of the population. In conclusion, the elementary schools assumed to run the inclusion education program were found to be just "on the way to" the inclusion education program, since all the subsystems for the program had not been sufficiently provided. This would continuously hold out if the authority did not prepare supporting factors, resulting in unachieved program.*

Key words: *Inclusion Education Program*

PENDAHULUAN

Program pendidikan inklusi merupakan kebijakan pemerintah, yang bertujuan untuk mengakomodasi aspek keadilan dalam pendidikan. Program pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan dimana semua anak berkebutuhan khusus dilayani di kelas reguler bersama-sama teman seusianya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Di sini ditekankan adanya restrukturisasi sekolah sebagai komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, (Stainback, 1992). Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.

Program tersebut hendaknya tidak lepas dari filsafat dasar pendidikan nasional, yaitu menjadikan manusia sebagai individu yang berkepribadian dan memiliki sifat-sifat yang tersurat serta tersirat di dalam ideologi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, nilai kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sebagai nilai ideologis bangsa harus difungsikan

sebagai dasar dan tujuan pendidikan, sekaligus jiwa serta semangat di dalam seluruh proses pendidikan.

Paradigma keadilan hendaknya tidak membuat polarisasi yang diskriminatif antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang dinaungi atau dilindungi kekuasaan dan yang jauh dari kekuasaan, serta antara yang sehat fisiknya dan yang kurang sehat. Dengan demikian yang kuat tidak akan tetap menjadi kuat, dan yang lemah tidak akan tetap menjadi lemah. Hal ini tidak akan bertentangan dengan demokrasi dan keadilan di dalam pendidikan yang berperikemanusiaan.

Prinsip keadilan dalam pendidikan tidak menuntut keberpihakan. Maksudnya peserta didik yang *gifted dan talented* serta berkebutuhan khusus baik yang memiliki finansial tinggi dan rendah sama-sama memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi keunggulan dan potensi kompetitif, serta mempunyai peluang, kesempatan, dan kemampuan untuk memperoleh akses ke sekolah-sekolah untuk mengikuti pendidikan secara maksimal dan optimal.

Untuk siswa yang memiliki kemampuan menonjol (*gifted and talented*), dari siswa lain yang normal perlu diupayakan usaha-usaha persiapan secara khusus. Begitu juga untuk siswa yang memerlukan pelayanan khusus (*special educational needs*), sehingga mereka yang lemah dari sisi intelektual dan finansial akan mendapatkan pelayanan yang memadai. Hal ini dijiwai oleh UUSPN No: 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 dan pasal 32, tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, juga dilandasi pernyataan Salamanca tahun 1994 yang merupakan perluasan tujuan *Education For All*. Berdasarkan estimasi jumlah mereka 3% dari populasi anak usia sekolah, ditahun 2001 baru 3,7% yang terlayani di lembaga persekolahan, sehingga 96,3% belum memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan secara segregasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), yang mayoritas berlokasi di ibukota kecamatan dan kabupaten. Di sisi lain anak-anak berkebutuhan khusus tersebar di seluruh desa yang jauh dari sekolah tersebut, sehingga mereka tidak dapat bersekolah. Sementara itu sekolah-sekolah reguler terdekat tidak dapat menerima mereka. Alasannya adalah sekolah tidak memiliki guru yang dapat melayani mereka, sehingga sekolah tidak siap untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi memiliki akar yang sama dengan konsep/pandangan hidup *Bhinneka Tunggal Ika* baik secara vertikal (inteligensi, ketajaman sensoris, kekuatan fisik, kematangan emosi, ketajaman emosi), dan horizontal (ras, suku bangsa, agama, adat, bahasa). Dalam dunia pendidikan, konsep perbedaan terkait dengan *individua differences*, dan dimungkinkan munculnya saling berhubungan antar manusia dalam rangka saling membutuhkan. Kesamaan mengarah pada misi yang diemban oleh manusia dalam kehidupan, yaitu semata-mata mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aktualisasi pandangan hidup tersebut adalah terintegrasinya anak-anak luar biasa dengan anak-anak lain pada umumnya dalam suasana gotongroyong untuk meningkatkan kualitas pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (Mulyono, 1999).

Di Indonesia ada tiga kekurangan utama dalam usaha memberikan perhatian kepada anak-anak yang memerlukan pelayanan khusus, yaitu (1) prosentase penderita cacat

yang mendapatkan layanan pendidikan masih kecil sekali yaitu 0,2%, (2) perhatian pemerintah pada penderita cacat masih amat rendah yaitu hanya menyediakan 4% dari total sekolah dan menampung 8% dari penderita cacat yang bersekolah, (3) layanan pendidikan luar biasa mayoritas terdapat di lima kota besar di Pulau Jawa. Artinya anak-anak di kota kecil dan terpencil (3.750 anak berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan sosial) masih banyak yang terabaikan, (Nurkolis, 2005).

Di Provinsi Lampung Jenjang pendidikan yang sudah memiliki kelas inklusi adalah jenjang pendidikan dasar dan menengah atas, dan tersebar di 8 wilayah tingkat dua atau kabupaten. Di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 7 sekolah dasar, di Kabupaten Tulang Bawang terdapat 2 sekolah dasar dan 1 SMA, di Kota Metro 2 sekolah dasar dan 1 SMA, di Kabupaten Lampung Timur 2 sekolah dasar, di Kota Bandar Lampung 1 sekolah dasar, di Kabupaten Way Kanan 1 sekolah dasar, di Kabupaten Lampung Utara 1 sekolah dasar dan di Kabupaten Lampung Tengah 1 sekolah dasar. Berdasarkan paparan di atas, maka dirasa perlu dilakukan survei terhadap program pendidikan inklusi untuk melihat sejauhmana persepsi warga sekolah terhadap program tersebut.

Rumusan permasalahan dalam kajian ini adalah: "Bagaimana persepsi warga sekolah terhadap program pendidikan inklusi di sekolah dasar Provinsi Lampung?". Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan persepsi warga sekolah terhadap program pendidikan inklusi di sekolah dasar Provinsi Lampung, meliputi guru, kurikulum, perencanaan pembelajaran, sarana dan prasarana, dana, strategi pembelajaran, evaluasi, hasil belajar dan *outcomes*.

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi sekolah penyelenggara program pendidikan inklusi, agar lebih meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan bagi pengambil kebijakan sebagai dasar untuk mengembangkan program.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di 17 SD Provinsi Lampung yang sudah menyelenggarakan program pendidikan inklusi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah kepala sekolah, komite sekolah, guru, orangtua siswa "normal", orangtua siswa berkebutuhan khusus, dan siswa "normal". Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling, yaitu 25% untuk guru, orangtua siswa "normal, orangtua siswa "berkebutuhan khusus" dan siswa "normal".

No.	Subyek	Populasi	Sampel
1	Kepala sekolah	17	17
2	Komite sekolah	34	34
3	Guru	153	38
4	Orangtua siswa "normal"	4080	1020
5	Orangtua siswa "berkebutuhan khusus"	476	119
6	Siswa "normal"	4080	1020

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, orangtua siswa "normal", orangtua siswa berkebutuhan khusus, dan siswa "normal" terhadap guru, kurikulum, perencanaan pembelajaran, sarana dan prasarana, dana, strategi pembelajaran, evaluasi, hasil belajar dan *outcomes* adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, Orangtua siswa "normal", Orangtua siswa "berkebutuhan khusus", dan siswa "normal" terhadap guru di SD penyelenggara program pendidikan inklusi

No.	Subyek	Tanggapan / %	Aspek yang ditanggapi		
			Latar belakang pendidikan guru	Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti	Kemampuan guru mengajar
1	Kepala sekolah	Memadai	F 7 % 41,18	2 11,77	5 29,41
		Tidak memadai	F 10 % 58,82	15 88,23	12 70,59
2	Komite sekolah	Memadai	F 4 % 11,76	2 5,88	14 41,18
		Tidak memadai	F 30 % 88,24	32 94,12	20 58,82
3	Guru	Memadai	F 8 % 21,05	5 13,15	15 39,47
		Tidak memadai	F 30 % 78,95	33 86,85	23 60,53
4	Orangtua siswa "normal"	Memadai	F - % -	- -	856 83,92
		Tidak memadai	F - % -	- -	164 16,08
5	Orangtua siswa "berkebutuhan khusus"	Memadai	F - % -	- -	109 91,60
		Tidak memadai	F - % -	- -	10 8,4
6	Siswa "normal"	Memadai	F - % -	- -	882 86,47
		Tidak memadai	F - % -	- -	138 13,53

Dari Tabel 1 terlihat bahwa, menurut persepsi kepala sekolah, komite sekolah dan guru, latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah diikuti oleh guru, dan kemampuan guru mengajar masih belum memadai (> 58%). Hal ini dimungkinkan karena guru di SD yang memiliki program pendidikan inklusi tidak memiliki

guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, dan jumlah guru yang pernah mengikuti diklat inklusi rata-rata di sekolah tersebut baru dua, dimana waktu diklat juga hanya satu bulan. Sedangkan menurut orangtua siswa "normal", orangtua siswa "berkebutuhan khusus, dan siswa "normal" kemampuan guru mengajar sudah memadai (> 83%), hal ini disebabkan karena mereka tidak tahu bahwa anak berkebutuhan khusus, memerlukan pelayanan khusus dari guru.

Tabel 2. Persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, terhadap kurikulum di SD penyelenggara program pendidikan inklusi

No.	Subyek	Tanggapan / %		Aspek yang ditanggapi		
				Relevansi	Sistematis	Kecukupan
1	Kepala sekolah	Ya	F	9	14	11
			%	52,94	82,35	64,70
		Tidak	F	8	3	6
			%	47,06	17,65	35,30
2	Komite sekolah	Ya	F	30	29	25
			%	88,23	85,30	73,53
		Tidak	F	4	5	9
			%	11,77	14,70	26,47
3	Guru	Ya	F	36	35	30
			%	94,74	92,11	78,95
		Tidak	F	2	3	8
			%	5,26	7,89	21,05

Dari Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa, menurut persepsi kepala sekolah, komite sekolah, dan guru kurikulum program pendidikan inklusi pada hakikatnya sudah relevan dengan kebutuhan siswa (tingkat perkembangan fisik dan psikologis siswa) berkebutuhan khusus (> 52%), sudah sistematis (> 82%) karena kurikulum sudah disusun berdasarkan pendekatan sistem mengikuti langkah-langkah pemecahan masalah, dari aspek kecukupan sudah (> 64%), kurikulum sudah memuat tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.

Kurikulum SD program inklusi menggunakan kurikulum SD reguler, walaupun sudah relevan, sistematis dan kecukupan, tetapi masih menuntut guru untuk melakukan modifikasi, sehingga pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kekhususannya.

Pada Tabel 3 di bawah, dapat dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran untuk SD yang menerapkan program pendidikan inklusi, menurut kepala sekolah, komite sekolah tujuan yang dirumuskan sudah signifikan, realistis dari segi implementasi, mampu memecahkan masalah sesuai dengan tujuan, dan dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi kelas (> 73%), tetapi menurut guru tidak relevan dan adaptabel (> 78%), walaupun sudah signifikan dan feasibilitas (> 52%).

Tabel 3. Persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, terhadap perencanaan pembelajaran di SD penyelenggara program pendidikan inklusi

No.	Subyek	Tanggapan / %	Aspek yang ditanggapi				
			Signifikansi	Feasibilitas	Relevansi	Adaptabilitas	
1	Kepala sekolah	Ya	F	17	15	17	13
			%	100	88,24	100	76,47
		Tidak	F	-	2	-	4
			%	-	11,76	-	23,53
2	Komite sekolah	Ya	F	34	30	34	25
			%	100	88,24	100	73,53
		Tidak	F	-	4	-	9
			%	-	11,76	-	26,47
3	Guru	Ya	F	20	24	4	8
			%	52,63	63,16	10,53	21,05
		Tidak	F	18	14	34	30
			%	47,37	36,84	89,47	78,95

Temuan ini dimungkinkan, karena perencanaan pembelajaran SD yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi, harus dibuat berdasarkan asesmen, sehingga guru mempunyai data kemampuan awal siswa, sebagai dasar menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI). Sementara itu hal ini menyulitkan guru, selain karena guru tidak mau melakukan inovasi, juga karena latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka yang tidak relevan (sesuai dengan Tabel 1).

Tabel 4. Persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, Orangtua siswa "normal", Orangtua siswa "berkebutuhan khusus", dan siswa "normal" terhadap sarana dan prasarana di SD penyelenggara program pendidikan inklusi

No.	Subyek	Tanggapan / %	Aspek yang ditanggapi			
			Relevansi	Kualitas	Kecukupan	
1	Kepala sekolah	Memadai	F	2	6	1
			%	11,76	35,30	5,88
		Tidak memadai	F	15	11	16
			%	88,24	64,70	94,12
2	Komite sekolah	Memadai	F	2	-	2
			%	5,88	-	5,88
		Tidak memadai	F	32	34	32
			%	94,12	100	94,12
3	Guru	Memadai	F	3	1	-
			%	7,90	2,63	-
		Tidak memadai	F	35	37	38
			%	92,10	97,37	100
4	Orangtua siswa "normal"	Memadai	F	2	6	2
			%	0,20	0,59	0,20
		Tidak memadai	F	1018	1012	1018
			%	99,80	99,41	99,80

5	Orangtua siswa "berkebutuhan khusus"	Memadai	F	7	9	3
			%	5,88	7,56	2,52
		Tidak memadai	F	112	110	116
			%	94,12	92,44	97,48
6	Siswa "normal"	Memadai	F	224	368	406
			%	21,96	36,08	39,80
		Tidak memadai	F	796	652	614
			%	78,04	63,92	60,20

Dari Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa, persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, Orangtua siswa "normal", Orangtua siswa "berkebutuhan khusus", dan siswa "normal" terhadap sarana dan prasarana di SD penyelenggara program pendidikan inklusi tidak cocok dengan kondisi fisik anak berkebutuhan khusus, kualitasnya pun memprihatinkan, dan jumlahnya juga tidak memadai (> 63%).

Sarana dan prasarana belajar untuk anak berkebutuhan khusus harus berbeda dengan anak "normal", karena mereka dari fisik dan psikisnya berbeda dengan anak normal, sehingga menuntut sarana dan prasarana yang berbeda pula, baik dari aspek ukuran, warna dan bentuk. Dengan demikian anak akan betah belajar.

Tabel 5. Persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, Orangtua siswa "berkebutuhan khusus", terhadap dana di SD penyelenggara program pendidikan inklusi

No.	Subyek	Tanggapan / %	Aspek yang ditanggapi			
			Tepat waktu	Tepat guna	Kecukupan	
1	Kepala sekolah	Ya	F	-	6	1
			%	-	35,29	5,88
		Tidak	F	17	11	16
			%	100	64,71	94,12
2	Komite sekolah	Ya	F	1	6	-
			%	2,94	17,65	-
		Tidak	F	33	28	34
			%	97,06	82,35	100
3	Guru	Ya	F	-	18	2
			%	-	47,37	5,26
		Tidak	F	38	20	36
			%	100	52,63	94,74
4	Orangtua siswa "berkebutuhan khusus"	Ya	F	45	97	102
			%	37,82	81,51	85,71
		Tidak	F	74	22	17
			%	62,18	18,49	14,29

Dari Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa, Persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, terhadap dana di SD penyelenggara program pendidikan inklusi masih belum cukup, dan datangnya juga tidak tepat waktu, sehingga juga masih banyak aspek yang belum dapat terpenuhi dari dana tersebut (> 64%). Tetapi menurut Orangtua siswa "berkebutuhan

husus", sudah bermanfaat dan cukup (> 82%), walaupun pemberian beasiswa untuk anaknya tidak tepat waktu.

Suatu program akan dapat maksimal jika didukung dana yang cukup, sehingga operasionalisasi program akan berkualitas dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan program.

Tabel 6. Persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, Orangtua siswa "berkebutuhan khusus", dan siswa "normal" terhadap strategi pembelajaran di SD penyelenggara program pendidikan inklusi

No.	Subyek	Tanggapan / %		Aspek yang ditanggapi	
				Sistemik	Konsistensi
1	Kepala sekolah	Ya	F	17	11
			%	100	64,71
		Tidak	F	-	6
			%	-	35,29
2	Komite sekolah	Ya	F	34	28
			%	100	82,35
		Tidak	F	-	6
			%	-	17,65
3	Guru	Ya	F	38	15
			%	100	39,47
		Tidak	F	-	23
			%	-	60,53
4	Orangtua siswa "berkebutuhan khusus"	Ya	F	118	116
			%	99,16	97,48
		Tidak	F	1	3
			%	0,84	2,52
5	Siswa "normal"	Ya	F	1011	1006
			%	99,12	98,63
		Tidak	F	9	14
			%	0,88	1,37

Dari Tabel 6 tampak bahwa, persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, Orangtua siswa "berkebutuhan khusus", dan siswa "normal" terhadap strategi pembelajaran di SD penyelenggara program pendidikan inklusi sudah sistemik (> 64%). Tetapi menurut guru untuk bertindak konsisten di setiap pembelajaran masih sulit (60,53%).

Memadukan semua komponen dalam pembelajaran merupakan keharusan bagi semua guru, sehingga semua anak dengan segala keunikannya dapat terlayani dengan baik dan benar. Tetapi untuk konsisten di setiap pertemuan akan sulit, karena setiap waktu anak akan berubah, sehingga guru juga harus menyesuaikan dengan perubahan itu, artinya guru harus inovatif, kreatif dan sensitif terhadap perubahan yang terjadi.

Tabel 7. Persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan Orangtua siswa "berkebutuhan khusus" terhadap evaluasi di SD penyelenggara program pendidikan inklusi

No.	Subyek	Tanggapan / %		Aspek yang ditanggapi		
				Competency referenced	Berkelanjutan	Didaktis
1	Kepala sekolah	Ya	F	17	17	17
			%	100	100	100
		Tidak	F	-	-	-
			%	-	-	-
2	Komite sekolah	Ya	F	30	32	33
			%	88,24	94,12	97,06
		Tidak	F	4	2	1
			%	11,76	5,88	2,94
3	Guru	Ya	F	37	38	30
			%	97,37	100	78,95
		Tidak	F	1	-	8
			%	2,63	-	21,05
4	Orangtua siswa "berkebutuhan khusus"	Ya	F	109	117	119
			%	91,60	98,32	100
		Tidak	F	10	2	-
			%	8,40	1,68	-

Dari Tabel 7 dapat dijelaskan, bahwa persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan Orangtua siswa "berkebutuhan khusus" terhadap evaluasi di SD penyelenggara program pendidikan inklusi sudah sesuai dengan kompetensi yang akan diukur/valid, dilakukan secara berkelanjutan dan memuat nilai-nilai didaktis (> 88%).

Evaluasi untuk siswa berkebutuhan khusus harus dilakukan secara berkelanjutan dan benar-benar menerapkan prinsip keadilan, walaupun kompetensi yang diukur sama, tetapi alat ukurnya harus berbeda dengan anak normal baik bentuk, jenis, dan tingkat kesukaran soalnya. Dari evaluasi selain memang akan mengukur kemampuan anak, juga memuat nilai-nilai lainya yaitu kejujuran, dan saling menghargai.

Tabel 8. Persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, Orangtua siswa "normal", Orangtua siswa "berkebutuhan khusus", dan siswa "normal" terhadap hasil belajar di SD penyelenggara program pendidikan inklusi

No.	Subyek	Tanggapan / %		Aspek yang ditanggapi	
				Relevansi	Keseimbangan
1	Kepala sekolah	Ya	F	17	17
			%	100	100
		Tidak	F	-	-
			%	-	-
2	Komite sekolah	Ya	F	33	26
			%	97,06	76,47
		Tidak	F	1	8
			%	2,94	23,53
3	Guru	Ya	F	30	34
			%	78,95	89,47
		Tidak	F	8	4
			%	21,05	10,53
4	Orangtua siswa "normal"	Ya	F	752	596
			%	73,73	58,43
		Tidak	F	268	424
			%	26,27	41,57
5	Orangtua siswa "berkebutuhan khusus"	Ya	F	119	119
			%	100	100
		Tidak	F	-	-
			%	-	-
6	Siswa "normal"	Ya	F	548	621
			%	53,73	60,88
		Tidak	F	472	399
			%	46,27	39,12

Dari Tabel 8 terlihat bahwa, menurut persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, orangtua siswa "normal", orangtua siswa "berkebutuhan khusus", dan siswa "normal", siswa berkebutuhan khusus mengalami perubahan dengan adanya program pendidikan inklusi, baik aspek kognitif, afektif dan psikomotor, dan hal ini sesuai dengan kebutuhannya.

Hasil belajar siswa berkebutuhan khusus akan mengalami perubahan secara optimal sesuai dengan kemampuan maksimalnya, jika didukung oleh PPI, sarana dan prasarana, guru, iklim yang kondusif dan faktor lainnya.

Pada Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa, menurut kepala sekolah, komite sekolah, guru, orangtua siswa "normal", orangtua siswa "berkebutuhan khusus" dan siswa normal, setelah keluar dari SD siswa berkebutuhan khusus secara akademis, sosial dan psikologis diterima oleh masyarakat luas (> 70%). Tetapi siswa berkebutuhan khusus masih sulit untuk mengakses pendidikan di tingkat berikutnya yaitu SMP dan yang sederajat (> 585%).

Tabel 9. Persepsi kepala sekolah, komite sekolah, guru, Orangtua siswa "normal", Orangtua siswa "berkebutuhan khusus", dan siswa "normal" terhadap *outcomes* di SD penyelenggara program pendidikan inklusi

No.	Subyek	Tanggapan / %		Aspek yang ditanggapi	
				Relevansi	Aksesabilitas
1	Kepala sekolah	Ya	F	12	7
			%	70,60	41,18
		Tidak	F	5	10
			%	29,4	58,82
2	Komite sekolah	Ya	F	24	8 26
			%	70,59	23,53
		Tidak	F	10	26
			%	29,41	76,47
3	Guru	Ya	F	30	4
			%	78,95	10,53
		Tidak	F	8	34
			%	21,05	89,47
4	Orangtua siswa "normal"	Ya	F	1011	28
			%	99,12	2,75
		Tidak	F	9	992
			%	0,88	97,25
5	Orangtua siswa "berkebutuhan khusus"	Ya	F	119	6 113
			%	100	5,04
		Tidak	F	-	113
			%	-	94,96
6	Siswa "normal"	Ya	F	1012	169
			%	99,22	16,57
		Tidak	F	8	851
			%	0,78	83,43

Hal ini tidak akan terjadi, jika ada perlakuan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus yang akan masuk SMP, misalnya tidak ada seleksi bagi mereka, dan atau adanya kebijakan SMP inklusi sehingga mereka tetap dapat mengakses pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sekolah Dasar di Provinsi Lampung yang menerapkan program pendidikan inklusi baru sebatas "menuju" program pendidikan inklusi. Hal ini akan terus bertahan jika pengambil kebijakan tidak mempersiapkan faktor pendukung program.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan:

1. Pengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi program pendidikan inklusi, dalam rangka menyukseskan program wajib belajar 9 tahun, dan memudahkan siswa untuk mengakses pendidikan.
2. Sekolah penyelenggara program pendidikan inklusi, untuk mengelola program dengan profesional baik perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran, tentunya dengan mengoptimalkan semua komponen yang dimiliki sekolah sehingga program dapat berjalan maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman Mulyono. 1999. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurkolis. *Reformasi Kebijakan Pendidikan Luar Biasa*, 2005 (www://google.pendidikan inklusi).
- Stainback William. *Contraversial Issues Confronting Special Education*. 1992. USA: Allyn and Bacon.
-